

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSRENBANG**

**(Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)**

**Merry Agustin**

**(S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya)**

**Tjitjik Rahaju, S.Sos, M.Si.**

## **Abstrak**

Partisipasi masyarakat adalah sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk partisipasi merupakan penunjang keberhasilan program yang di berikan oleh pemerintah. Program Pembangunan Jalan Poros Desa (Japordes) di Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yaitu dengan membuat akses masyarakat menjadi lebih mudah dalam melakukan aktifitasnya yang awalnya kondisi jalan tidak layak untuk dilewati saat musim hujan oleh karena itu di harapkan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa melalui Musrenbang di Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber penelitian ini diantaranya adalah aparat Desa serta warga Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah memberikan partisipasi dan dukungannya dalam pembangunan Jalan Poros Desa ( Japordes). Warga Desa Tunggunjagir bersedia memberikan partisipasinya dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan yaitu partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan kehadiran masyarakat dalam menghadiri musyawarah yang diselenggarakan oleh aparat Pemerintah Desa Tunggunjagir, partisipasi dalam pelaksanaan diwujudkan dalam bentuk tenaga, uang, bahan(marerial), partisipasi dalam kemanfaatan diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemeliharaan lingkungan, dan partisipasi dalam evaluasi diwujudkan dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan untuk perbaikan Japordes. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dinilai baik yang ditunjukkan dengan peran serta masyarakat yang aktif dalam pembangunan Japordes meskipun perlu adanya evaluasi dalam pembangunan Jalan Poros Desa (Japordes) agar dapat terselesaikan dengan baik.

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah Agar program dapat terlaksana dengan baik yaitu dengan mengkoordinir dengan masyarakat agar nantinya masyarakat mendukung sepenuhnya dalam kelancaran pembangunan Jalan Poros Desa (Japordes).

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan

## **Abstract**

Public participation is as a form of the involvement of members of the community in all development which includes activities in the planning and implementation of development programs. Community participation in the form of participation is supporting success program given by the government. Program Development programs village axis road ( japordes ) in the village tunggunjagir in mantup district lamongan aims to public welfare is to make access easier in doing their activity originally road conditions unfit for impassable winter hence in expect participation of the community to resolve existing problems in the village

This study attempts to describe participation in rural development planning through musrenbang in tunggunjagir village in mantup district lamongan. Research method used is descriptive with a qualitative approach. But speakers this study of them are village officials and villagers tunggunjagir in mantup district lamongan. Data collection techniques used in the form of interview , observation and documentation. Analysis of data done with data collection , reduction data , presentation of data , and the withdrawal of conclusion.

The result showed that villagers tunggunjagir in mantup district lamongan gave participation and support in development village axis road ( japordes ). Villagers tunggunjagir willing to give their participation in any activity conducted the participation in planning , participation in the , participation in benefit , participation in evaluation. In this research shows that public participation can be assessed good demonstrated by the role of the active in the development although it needs evaluation in development village axis road ( japordes ) in order to resolve well

Advice given in this research is that the program can be accomplished with coordination namely with the community to the people support fully in the smooth development of village axis road ( japordes ) .

Keywords: public participation and development

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasar pada kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan. Menurut Ndraha (dalam Huraerah, 2011:110) pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam setiap tahap pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, serta tahap evaluasi. Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1981:154-155) yang mengemukakan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan daerah mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan aspek kebutuhan masyarakat (Adisasmita, 2006:4). Berkaitan dengan proses pembangunan desa tersebut, maka partisipasi menjadi hal yang penting dilakukan karena partisipasi masyarakat adalah sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keterlibatan anggota masyarakat

diwujudkan dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa (Adisasmita (2006:42).

Demikian halnya dengan pembangunan Japordes (Jalan Poros Desa) di Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantub Kabupaten Lamongan, yang telah berjalan sejak 2014. Program tersebut merupakan program perbaikan jalan antar dusun yang diharapkan dapat menjadi penghubung antar dusun. Jalan merupakan urat nadi bagi kehidupan masyarakat karena tanpa adanya jalan maka proses mobilitas dalam pendistribusian barang dan jasa akan sulit dilakukan, kondisi jalan yang baik membuat jalur distribusi menjadi lancar. Berbagai pembangunan yang dilakukan pada akhirnya menempatkan keberadaan jalan sebagai sesuatu yang penting karena dapat menghidupkan berbagai aktivitas ekonomi di daerah yang menjadi jalur perlintasan tersebut. Dengan adanya jalan, maka dapat menjadi pembuka peluang bagi kemajuan dan tumbuhnya berbagai kegiatan.

Japordes di Desa Tunggunjagir diharapkan terwujud dengan alasan untuk mengejar ketertinggalan ekonomi. Dimana masyarakat Desa Tunggunjagir yang berprofesi sebagai petani, seringkali mengalami hambatan mengambil hasil panennya, dikarenakan jalan yang rusak dan banyak lubang. Selain itu, masyarakat desa umumnya juga tidak bisa beraktifitas dengan normal karena kondisi rusak tersebut terutama jika musim hujan.

Pembangunan Japordes sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Tunggunjagir karena proses perencanaan sampai dengan pelaksanaannya dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tunggunjagir itu sendiri. Pada tahap perencanaan, masyarakat terlibat aktif memberikan usulan serta gagasan dalam Musrenbang desa. Partisipasi masyarakat dalam bentuk ide perencanaan tersebut dalam pelaksanaan Musrenbang desa.

Musrenbang merupakan forum perencanaan yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan

yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa (kawasan.bappenas.go.id/index).

Dalam perencanaannya program Japordes ini juga melibatkan masyarakat. Seperti yang dituturkan oleh sekretaris Desa :

“Dalam perencanaannya program Japordes ini juga melibatkan masyarakat, terutama ketika pengusulan program yang sebelumnya dibahas dalam musrenbang desa. Dimana dalam musrenbang tersebut dilibatkan RT, RW, Tim Penggerak PKK, BPD, LPM, serta Tokoh masyarakat”. ( Wawancara awal tanggal 9 Maret 2015 )

Sedang tujuan dari dilaksanakannya musrenbang tersebut adalah :

1. Menetapkan prioritas kegiatan yang dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa (ADD), Swadaya murni masyarakat dna atau sumbangan lain yang sah;
2. Menetapkan Prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui PNPB-MP, APBD Kabupaten dan APBD Propinsi atau APBN;
3. Mengirim daftar nama anggota Delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa dapat Forum Musrenbang Kecamatan (Musrenbang Desa TunggungJagir Tahun 2015).

Evaluasi setelah program japordes tersebut selesai dibangun adalah diadakannya musyawarah desa atau rapat oleh aparatur desa yang bertujuan untuk memelihara hasil pembangunan jalan yang telah dilakukan. (Wawancara dengan bapak Sekertaris Desa Tunggungjagir, 30 Mei 2015).

Pembangunan infrastruktur jalan diharapkan mampu membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, selain itu juga diharapkan dapat memperlancar aktifitas petani sehingga mampu mengoptimalkan kemampuan bekerja serta diharapkan pula mampu mengentaskan kemiskinan di Desa Tunggungjagir.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan Japordes Desa Tunggung Jagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan”**.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dimunculkan disini adalah

“Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Pembangunan Japordes Desa Tunggung Jagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan?

## C. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan partisipasi masyarakat dalam Program Pembangunan Japordes Desa Tunggung Jagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

## Kajian Pustaka

### A. Kajian Partisipasi Masyarakat

#### 1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Dalam membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, pemerintah perlu untuk mengetahui perkembangan di daerah terlebih dahulu. Peran pemerintah dalam pembangunan tidak terlepas dari peran masyarakat, maka keberadaan masyarakat juga tidak dapat dipandang sebelah mata dalam kehidupan bernegara dan dalam kegiatan pembangunan.

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa inggris “participation” yang artinya mengambil bagian / keikutsertaan. Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia “partisipasi” berarti; hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan keikutsertaan. Menurut Canter (Arimbi, 1993:1) mendefinisikan partisipasi sebagai *feed-forward information and feedback information*. Dengan definisi tersebut, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dan dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan.

Pusic (dalam Adi, 2001:206-207) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan diatas kertas, berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dilihat dari 2 hal, yaitu :

#### a. Partisipasi dalam perencanaan

Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program/program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama sedangkan sisi negatifnya adalah kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antara kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya

dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sulit dilakukan. Namun dapat dilakukan dengan system perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili warga masyarakat.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Segi positif dari partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program ( penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga negara sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksanaan pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

Sedangkan, menurut pendapat Tjokroamidjojo (dalam syafi'1 2007;104) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu:

- a. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- c. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan.

Nelson, Bryant dan White (1982:206) menyebutkan bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal masyarakat. Disebut partisipasi vertical karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat yang terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungannya dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. sedangkan partisipasi horizontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, dimana setiap anggota / kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Selain itu, menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam Lokita (2011;5) yang mendefinisikan partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara kerjanya, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumber daya atau bekerja sama dalam suatu organisasi, keterlibatan masyarakat menikmati hasil dari pembangunan serta dalam evaluasi pelaksanaan program.

## 2. Jenis - Jenis Partisipasi Masyarakat

Menurut Keith Davis dalam Sastropoetro (1988:16), jenis-jenis partisipasi meliputi:

- a. Pikiran
- b. Tenaga
- c. Pikiran dan tenaga
- d. Keahlian
- e. Barang dan
- f. Uang

Huraerah (2008:117) membagi partisipasi ke dalam lima macam, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
2. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa dari luar hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
3. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
5. Partisipasi representative dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Ndraha (1987:103) membagi partisipasi menjadi 6 bentuk atau tahapan yaitu:

- a. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan social.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan member tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan.
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.

- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
- f. Partisipasi dalam memulai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ndraha (1987:104-105) juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat digerakkan melalui:

- a. Program pembangunan yang dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat.
- b. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- c. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian Goldmith dan Blustain berkesimpulan bahwa masyarakat tergelak untuk berpartisipasi jika:

- a. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
- b. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
- c. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
- d. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya control yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

### 3. Pendekatan Partisipasi Masyarakat

Menurut Club du Sahel dalam Mikkelsen (2003), beberapa pendekatan untuk memajukan partisipasi masyarakat yaitu:

- 1. Pendekatan pasif, pelatihan dan informasi yakni pendekatan yang beranggapan bahwa pihak eksterna lebih menguasai pengetahuan,

teknologi, keterampilan dan sumber daya. Dengan demikian partisipasi tersebut memberikan komunikasi satu arah, dari atas ke bawah dan hubungan pihak eksternal dan masyarakat bersifat vertical.

- 2. Pendekatan partisipasi aktif yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan para petugas eksternal, contohnya pelatihan dan kunjungan.
- 3. Pendekatan partisipasi dengan keterikatan masyarakat atau individu diberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan dan diberikan pilihan terikat pada sesuatu kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
- 4. Pendekatan dengan partisipasi setempat yaitu pendekatan dengan mencerminkan kegiatan pembangunan atas dasar keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat.

Agar memperbaiki kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka usaha untuk dapat menggerakkan partisipasi masyarakat:

- 1. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata.
- 2. Dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (respon) yang dikehendaki.
- 3. Dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (*behavior*) yang dikehendaki secara berlanjut (Ndraha, 1990).

Berdasarkan hasil penelitian Goldsmith dan Blustain tahun 1980 di Jamaica dalam Ndraha (1990), berkesimpulan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika:

- 1. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat.
- 2. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.

3. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya control yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

#### 4. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Cohen dan Uphoff (1977) dalam Mulyadi (2011:25) memberikan rumusan partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif dalam bentuk sebagai *participation of decision making, participation in implementation, participation in benefit* dan *participation in evaluation*. Bentuk partisipasi yang dikemukakan tersebut merupakan bentuk partisipasi yang lebih nyata terjadi di masyarakat.

##### a. *Participation in decision making*

*Participation in decision making* atau partisipasi dalam pengambilang keputusan adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui perencanaan pembangunan. Masyarakat dilibatkan dalam perumusan atau proses pembuatan keputusan dengan mengemukakan pendapat atau saran dalam menilai suatu program atau kebijakan yang akan ditetapkan. Adanya reformasi menyebabkan partisipasi dilaksanakan melalui konsultasi publik dan dialog publik pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam konteks peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pejabat pembuat keputusan dan anggota-anggota masyarakat yang merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecah masalah dan pembuat keputusan.

Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa tercermin dari hal-hal berikut :

1. Keikutsertaan masyarakat dalam menghadiri rapat perencanaan pembangunan desa. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat desa dalam pembangunan adalah ikut serta dalam pembangunan desa ( Musrenbang ). Perencanaan pembangunan di desa dirumuskan melalui Musrenbang. Keikutsertaan masyarakat dalam hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa kemauan, kemampuan dan luangnya waktu berpengaruh terhadap luasnya partisipasi warga masyarakat dalam

proses pemabngunan (Iskandar, 2002:319).

2. Mengemukakan pendapat atau saran dalam setiap pertemuan rapat. Dengan memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta kemudian diungkapkan pada sebuah rapat pertemuan, maka akan menghasilkan sebuah ide yang dapat menjadi pertimbangan pada proses perencanaan pembangunan. Pendapat masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Memberikan data atau informasi dalam setiap pertemuan dan rapat pembangunan. hal ini, pemerintah merasa tidak berkewajiban untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat karena belum ada peraturan yang mewajibkan hal tersebut. Usaha pemerintah untuk mewujudkan kemitraan antara masyarakat dalam pemberian dan penerimaan informasi, dalam hal ini tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan data maupun informasi pada setiap pertemuan atau rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah.
4. Keikutsertaan masyarakat dalam proses perumusan atau perumusan pembuatan keputusan. Dalam proses tersebut merupakan proses keikutsertaan masyarakat secara langsung pada proses pembangunan.

##### b. *Participation in implementation*

*Participation in implementation* atau partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi pembangunan yang berwujud kontribusi. Cohen dan Uphoff (1977) dalam Mulyadi (2011:34) mengemukakan bahwa partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang dapat berwujud sebagai berikut:

##### a. Kontribusi dengan tenaga

Partisipasi dengan tenaga yaitu keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dengan terjun langsung dalam pelaksanaan

kegiatan pembangunan. Dalam kehidupan sosial keikutsertaan masyarakat dengan tenaga atau fisik terlihat pada pekerjaan gotong-royong dalam perbaikan jalan, jembatan, sarana ibadah dan pendidikan. Partisipasi masyarakat dengan memberikan kontribusi berupa tenaga merupakan suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melibatkan masyarakat secara langsung pada program-program pembangunan. Kerjasama yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah adalah upaya untuk menggerakkan peran serta masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

b. Kontribusi dengan uang

Kontribusi dengan uang adalah keikutsertaan masyarakat dalam bentuk sumbangan berupa uang. Hal ini biasanya diberikan masyarakat karena masyarakat tidak dapat berpartisipasi langsung terhadap pembangunan. Peranserta masyarakat yang besar akan membawa pengaruh yang besar pula terhadap pembangunan.

Kesadaran masyarakat turut terlibat dalam memberikan kontribusi berupa uang menghadapi berbagai kendala antara lain faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan minimnya pendapatan masyarakat. Sehingga masyarakat beranggapan jangankan untuk memberikan sumbangan pembangunan, untuk memenuhi kebutuhan mereka saja masih sulit untuk dipenuhi.

c. Kontribusi dengan bahan (material)

Kontribusi dengan bahan (material) merupakan keikutsertaan masyarakat dengan memberikan sumbangan berupa bahan-bahan untuk kegiatan pembangunan fisik. Peran serta masyarakat pada dasarnya merupakan kesediaan secara sukarela dari seseorang untuk membantu kegiatan pembangunan yang berlangsung di daerahnya sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan demikian wujud dari partisipasi masyarakat sangat banyak bentuknya.

c. *Partisipasion in benefit*

*Partisipasion in benefit* atau partisipasi dalam kemanfaatan merupakan wujud peran dimana dalam

keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih positif bagi pemerintah dan masyarakat.

- a. Mengikuti kegiatan pemeliharaan kebersihan rumah dan lingkungan
- b. Mengikuti kegiatan keagamaan
- c. Mengikuti kegiatan pemeliharaan keamanan lingkungan
- d. Mengikuti kegiatan kelompok usaha ekonomi pertahanan daerah dan untuk meningkatkan perekonomian.

#### 4. *Partisipasion in evaluation*

*Partisipasion in evaluation* atau keikutsertaan dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan. Masyarakat dapat memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Sebagaimana Cohen dan Uphoff (1977:56-57) yang mengatakan bahwa masyarakat harus terlibat terhadap penyelenggaraan pembangunan desa, baik yang ditentukan oleh lembaga formal maupun informal, secara langsung maupun tidak langsung dari segenap aktivitas politik maupun publik opinion. Suwignjo (1985:110) partisipasi dalam evaluasi bertujuan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

### B. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa)

#### 1. Pengertian Musrenbang Desa

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepakatan tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-dumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Pembangunan tidak dapat berjalan maju apabila salah satu dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat dan swasta) tidak berperan atau

berfungsi, karena itu Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan (Buku Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ).

## B. Dasar Hukum Musrenbang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Payung hukum untuk pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang terbit setiap tahun. Untuk Musrenbang desa, kemudian diterbitkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perenanaan desa yang memuat petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 5 tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan.

Rencana dan penganggaran merupakan suatu kesatuan konsep dan proses yang tidak terpisahkan. Rencana pembangunan tidak dapat dilankan tanpa anggaran dan sumber pembiayaannya. Di tingkat desa disusun dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Payung hokum yang digunakan adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

## C. Tujuan Musrenbang Desa

Tujuan Musrenbang Desa adalah :

1. Menyetakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan desa yang akan menjadi bagan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan pemilahan sebagai berikut:
  - a. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh dessa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat.
  - b. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh dessa sendiri dan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD kabupaten/kota atau sumber dana lain;
  - c. Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang

kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kabupaten/kota atau APBD provinsi;

2. Menyetakati Tim Delegasi desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum Musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

## D. Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa

Konsep Musyawarah menunjukkan bahwa forum musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah adalah istilah sebenarnya mempunyai arti yang jelas merupakan forum untuk merembungkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama, bukan seminar atau sosialisasi informasi.

Proses Musrenbang jangan sampai disusun sebagai suatu acara seremonial yang separuh atau sebagian besar dadri waktunya di isi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato. Inti Musrenbang adalah partisipasi aktif warga. Musrenbang desa adalah forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan atau menyetakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. Dalam Musrenbang desa, pemerintah desa dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukan desanya melalui program pembangunan desa.

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut usman, Husairi dan akbar (2009:4) penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu sehingga penelitian deskriptif ini dapat memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta pada lokasi penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (mardalis,2009:4).

Pendekatan deskriptif kualitatif ini dipilih diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan focus penelitian yang dilakukan yaitu tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pada program Japordes.

### B. Fokus Penelitian

Moleong (2000:62) penetapan focus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi dalam menyaring informasi yang masuk dan keluar. Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya focus

penelitian supaya terdapat batasan-batasan informasi yang diperoleh di lapangan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mencari data. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pada pembangunan jalan poros desa pada program Japordes dengan sub fokus penelitian sebagai berikut: pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, kemanfaatan, dan fokus pada evaluasi program.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian merupakan tempat yang menjadi obyek penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data sebagai bahan kelengkapan dalam penyusunan laporan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Tunggungjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Alasan pemilihan tempat penelitian adalah desa ini adalah desa yang potensial terutama karena alasan banyak ditemukan sector ekonomi produktif berupa sarang walet. Namun sector tersebut tidak akan berkembang dengan baik jika tidak didukung dengan fasilitas yang memadai.

### D. Sumber Data

Dalam suatu penelitian diperlukan data-data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penelitian.

Data-data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan dua sumber data yaitu:

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang dilakukan melalui hasil angket dan wawancara selama penelitian berlangsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Kepala Desa Tunggungjagir, sekertaris desa, PKK, dan masyarakat Desa Tunggungjagir.

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data pelengkap atau penunjang dari data primer yang dikumpulkan dari data yang sesuai dan mendukung dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari teknik wawancara, dokumentasi, arsip-arsip, literature dan buku yang telah tersusun dalam arsip.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang valid, diperlukan data yang lengkap, akurat, sesuai dengan keadaan di lapangan, sehingga diperlukan teknik yang tepat untuk mendapatkan informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya

adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka (Afifudin dan Saebani, 2009:131). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pertanyaan-pertanyaannya telah disiapkan, seperti menggunakan pedoman wawancara (Afifudin dan Saebani, 2009:133). Penggunaan wawancara terstruktur didasari oleh keinginan peneliti untuk fokus pada pertanyaan yang relevan dengan penelitian, sehingga pertanyaan yang diajukan kepada informan akan lebih sistematis.

#### 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang berasal dari sumber non-manusia (Afifudin dan Saebani, 2009:141). Bentuk dari dokumentasi yaitu, catatan-catatan, transkrip arsip, dokumen pemerintah. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang lain.

#### 3. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data untuk mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subyek penelitian. Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi partisipasi pasif. Yang dimaksud dengan observasi partisipasi pasif menurut Sugiyono (2008:64) yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi Di Desa Tunggungjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan tentang perencanaan pembangunan Jalan Poros Desa (Japordes).

#### 4. Studi kepustakaan

Teknik ini termasuk teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara meneliti laporan-laporan, dokumen-dokumen, catatan-catatan, yang dapat menunjang perolehan data secara komprehensif sesuai dengan fokus penelitian, serta literature-literatur terkait dengan Partisipasi masyarakat dan perencanaan pembangunan Jalan Poros Desa (Japordes).

### F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan, analisis data adalah proses menyusun data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga lebih mudah dipahami (dalam Sugiono, 2012b:244).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Deskripsi Lokasi

Desa Tunggungjagir terletak di wilayah Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang sebagaian besar penggunaan lahan di Desa Tunggungjagir adalah untuk pertanian sawah dan masih terdapat kawasan hutan. Terdapat waduk sebagai tadah hujan di Desa ini, tinggi desa ini sekitar 75 m dari permukaan laut. Desa Tunggungjagir mempunyai luas wilayah 15.486 Ha.

Batas – batas wilayah Desa Tunggungjagir adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Maor  
Sebelah Timur : Desa Sumberdono  
Sebelah Selatan : Hutan  
Sebelah Barat : Desa Sukobendu

Desa Tunggunjagir terletak 3km dari Desa atau Kelurahan terjauh, 11km dari Ibu Kota Kecamatan, 22km dari Ibukota Kabupaten, dan 80km dari Ibukota Propinsi Jawa Timur. Luas wilayah Desa Tunggunjagir terdiri dari permukiman 204,135 Ha, sawah pasang surut 3.605 Ha, serta sawah tadah hujan 2.435Ha.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Tunggunjagir tahun 2014 jumlah penduduk Desa Tunggunjagir adalah sebagai berikut:

Jumlah penduduk : 5.151 jiwa  
Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 1.181 KK  
Jumlah penduduk laki – laki : 2.378 jiwa  
Jumlah penduduk perempuan : 2.773 jiwa

Berdasarkan observasi peneliti, kondisi jalan di Desa Tunggunjagir memang perlu dilakukan perbaikan mengingat kondisi jalan yang sudah tidak layak untuk dilewati. Apabila kondisi jalan bagus maka dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Selain itu pernyataan tersebut juga didukung oleh beberapa pendapat masyarakat yang mempunyai profesi pekerjaan berbeda-beda dari hasil wawancara peneliti di Desa Tunggunjagir sebagai berikut:

“Pembangunan di Desa Tunggunjagir memang seharusnya dilakukan dari dulu karena jalan rusak dapat menghambat aktifitas. Saya sebagai masyarakat Desa Tunggunjagir berprofesi sebagai guru dan tuntutan saya yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Dengan kondisi jalan yang rusak tersebut menjadi masalah karena saya harus berhati-hati ketika melewati jalan yang rusak dan berlubang agar tidak terjadi kecelakaan.”(Wawancara dengan Ibu Ulfa selaku guru TK Tunas Harapan di Desa Tunggunjagir, tanggal 20 Juni 2015)”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Sukirno selaku warga Desa Tunggunjagir yang berprofesi sebagai polisi adalah sebagai berikut:

“Keputusan pemerintah sangat tepat apabila mengambil kebijakan untuk membangun Japordes karena Japordes memang penting untuk dilakukan pembangunan melihat kondisi jalan yang sudah sangat rusak. Apalagi profesi saya sebagai polisi jadi dituntut untuk siap siaga sedangkan jarak dari kantor ke rumah cukup jauh apalagi akses jalan satu-satunya harus melewati jalan poros desa, sehingga banyak waktu terbuang sia-sia untuk melewati jalan tersebut.”(Wawancara dengan Bapak Sukirno selaku warga Desa Tunggunjagir yang berprofesi sebagai

anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Tikung, tanggal 20 Juni 2015).

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan Bapak Karmaun yang berprofesi sebagai petani adalah sebagai berikut :

“Japordes perlu dibangun terutama kulo sing dados petani ewet nek pun jalane rusak. Soale nek wes udan dalan e akeh linet dadi nek liwat kudu ngati-ati. Selain iku, jalan sing apik nggampangne petani ngusungi panen dadi isok minimno biaya gawe usung-usung. (Wawancara dengan Bapak Karmaun selaku warga Desa Tunggunjagir yang berprofesi sebagai petani, tanggal 20 Juni 2015).

Berikut adalah terjemahan penulis dari pernyataan diatas:

“Japordes sangat penting bagi saya terutama saya sebagai petani. Apabila jalan poros desa baik maka petani akan mudah dalam mengambil dan menjual hasil panen serta meminimalisir biaya angkut (Wawancara dengan Bapak Karmaun selaku warga Desa Tunggunjagir yang berprofesi sebagai petani, tanggal 20 Juni 2015).

Berdasarkan fakta dari beberapa pernyataan masyarakat diatas menegaskan bahwa jalan menjadi prioritas utama untuk kemajuan Desa Tunggunjagir terlebih masyarakat di Desa Tunggunjagir membutuhkan akses jalan tersebut. Oleh karena itu, jalan poros desa perlu untuk dilakukan perbaikan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitasnya. Kegiatan pembangunan Japordes tersebut merupakan program yang dicanangkan oleh aparat pemerintah desa berdasarkan aspirasi masyarakat.

## **2. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang**

Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan adalah desa yang pada saat ini kondisi ekonomi sosial masyarakatnya masih kurang bagus. Kondisi infrastruktur yang ada di Desa Tunggunjagir juga masih buruk terutama kondisi jalan desa. Belum memadai dan layaknya jalan Desa Tunggunjagir yang menjadi jalan penghubung antar dusun menjadi masalah yang sangat penting.

Dalam kaitannya, berikut ini akan dirumuskan tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa menurut pendapat Cohen dan Uphoff (1977) dalam Mulyadi (2011:25) memberikan rumusan partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif dalam bentuk – bentuk partisipasi sebagai berikut:

a). Partisipasi Masyarakat Desa Tunggunjagir dalam Perencanaan Pembangunan Japordes (*Participatoin in Decision Making*)

Tahapan program pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir yaitu melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa (Musrenbang) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dapat berjalan dengan lancar dengan melibatkan partisipasi masyarakat Desa Tunggunjagir. Masyarakat terlibat secara langsung mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi.

Perencanaan yang matang sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien oleh karena itu peranan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Japordes sangat diperlukan. Perencanaan pembangunan Japordes disusun berdasarkan hasil rembung desa yang diikuti oleh semua perangkat desa dan seluruh masyarakat Desa Tunggunjagir. Setelah melakukan sosialisasi tahap selanjutnya adalah pelaksanaan Musrenbang desa. Musyawarah pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu Musyawarah Desa 1, Musyawarah Desa II, dan Musyawarah Desa III.

b). Partisipasi Masyarakat Desa Tunggunjagir dalam Pelaksanaan Pembangunan Japordes (*Participation in Implementation*)

Pelaksanaan pembangunan Desa Tunggunjagir dapat berjalan dengan lancar karena adanya partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Karena partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam proses pembangunan Japordes.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar karena tanpa adanya partisipasi masyarakat maka proses pembangunan akan mengalami hambatan. Peneliti melaporkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Tunggunjagir.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan Japordes adalah sebagai berikut :

1). Partisipasi masyarakat Desa Tunggunjagir dalam Bentuk Tenaga

Bentuk sumbangan yang diberikan masyarakat Desa Tunggunjagir dalam pelaksanaan pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir yaitu dalam bentuk tenaga. Masyarakat Desa Tunggunjagir bergotong-royong dalam membangun Japordes dengan sukarela.

2). Partisipasi Masyarakat Desa Tunggunjagir dalam Bentuk uang.

Pembangunan Japordes tidak terlepas dengan adanya uang, meskipun tidak semua masyarakat memberikan bantuan berupa uang.

3). Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Bahan (*Material*)

Partisipasi masyarakat Desa Tunggunjagir dalam pembangunan Japordes juga diwujudkan dalam bentuk material atau bahan. Masyarakat memberikan bantuan material berupa pasir atau batu bahkan banyak masyarakat yang memberikan bantuan berupa makanan ketika proses pembangunan Japordes berlangsung. Masyarakat melakukan hal ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun tetapi masyarakat sadar dengan asas gotong-royong untuk mewujudkan pembangunan.

c). Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Kemanfaatan Desa Tunggunjagir (*Participation in Benefit*)

Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir melibatkan aparat pemerintah desa dan seluruh masyarakat Desa Tunggunjagir. Selain itu, pembangunan Japordes juga membawa manfaat secara langsung bagi anggota masyarakat. Kelompok yang mendapatkan manfaat secara langsung adalah masyarakat yang sebagaian besar berprofesi sebagai petani.

Untuk menjaga Japordes agar tetap baik maka perlu adanya pemeliharaan. Pemeliharaan tersebut antara lain :

- a. Menampung informasi dari masyarakat untuk mengetahui kerusakan jalan.
- b. Membuat anggaran dana operasional.
- c. Mengadakan perbaikan apabila ada kerusakan jalan.

Mekanisme pendanaan dalam operasi pemeliharaan dapat diperoleh cara sebagai berikut :

- a. Bantuan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- b. Mencari sumber dana atau bantuan dari pihak lain seperti perusahaan – perusahaan.
- c. Dana sukarela dari masyarakat dalam pemanfaatan.

Japordes dinilai banyak membawa manfaat bagi masyarakat Desa Tunggunjagir oleh sebab itu perlu adanya pemeliharaan agar jalan tidak rusak lagi. Upaya pemeliharaan jalan dapat dilakukan dengan cara pemeliharaan lingkungan serta sedini mungkin memperbaiki jalan yang rusak agar kerusakan tidak bertambah parah.

d). Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pembangunan (*Participation in Evaluation*)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kekurangan dari pelaksanaan pembangunan Japordes yang perlu diperbaiki. Tahap evaluasi dilakukan di dalam musyawarah desa, hingga kini baru sekali dilakukan evaluasi terhadap pembangunan Japordes di Desa Tunggunjagir. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui kerja bakti untuk menjaga lingkungan.

## B. Pembahasan

### Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan diatas diketahui bahwa partisipasi masyarakat Desa Tunggunjagir dalam pembangunan Japordes telah melalui beberapa tahap yaitu Tahap Perencanaan (*Participation in Decision Making*), Tahap Pelaksanaan (*Participation in Implementation*), Tahap Pemanfaatan (*Participation in Benefit*), dan Tahap Evaluasi (*Participation in Evaluation*).

Suatu keberhasilan pembangunan membutuhkan kerjasama antara pihak yang terkait dengan seluruh anggota masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pihak pemerintah Desa Tunggunjagir serta seluruh anggota masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan Japordes.

Pemerintah Desa Tunggunjagir dalam menyelenggarakan pembangunan Japordes selalu melibatkan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat Desa Tunggunjagir dengan mengadakan

musyawarah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti Musrenbang merupakan bukti bahwa masyarakat mendukung program pembanguann Japordes di Desa Tunggunjagir. Dengan adanya keterlibatan masyarakat maka masyarakat akan memahami pentingnya partisipasi dalam pembangunan Japordes. Oleh karena itu, dapat dilihat data partisipasi masyarakat Desa Tunggunjagir dari berbagai bentuk partisipasi adalah sebagai berikut :

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang**

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan diatas diketahui bahwa partisipasi masyarakat Desa Tunggunjagir dalam pembangunan Japordes telah melalui beberapa tahap yaitu Tahap Perencanaan (*Participation in Decision Making*), Tahap Pelaksanaan (*Participation in Implementation*), Tahap Pemanfaatan (*Participation in Benefit*), dan Tahap Evaluasi (*Participation in Evaluation*).

Suatu keberhasilan pembangunan membutuhkan kerjasama antara pihak yang terkait dengan seluruh anggota masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pihak pemerintah Desa Tunggunjagir serta seluruh anggota masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan Japordes.

Pemerintah Desa Tunggunjagir dalam menyelenggarakan pembangunan Japordes selalu melibatkan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat Desa Tunggunjagir dengan mengadakan musyawarah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti Musrenbang merupakan bukti bahwa masyarakat mendukung program pembanguann Japordes di Desa Tunggunjagir. Dengan adanya keterlibatan masyarakat maka masyarakat akan memahami pentingnya partisipasi dalam pembangunan Japordes.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan berkaitan dengan partisipasi masyarakat Desa Tunggunjagir dalam pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir, maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat Desa Tunggunjagir pada tahap perencanaan (*Participation in Decision Making*) dalam pembangunan jalan Desa Tunggunjagir di dalam Musyawarah Desa untuk merumuskan perencanaan pembangunan jalan Desa Tunggunjagir. Tingkat kehadiran masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sangat tinggi. Serta antusiasme masyarakat dalam menyampaikan pendapat untuk pembangunan Japordes juga sangat tinggi

2. Partisipasi masyarakat Desa Tunggunjagir pada tahap pelaksanaan (*Participation in Implementation*) dalam tahap pelaksanaan pembangunan Japordes di Desa Tunggunjagir dapat dikatakan sangat baik. Pada Tahap Pelaksanaan pembangunan jalan Desa Tunggunjagir terdapat tiga bentuk partisipasi masyarakat Desa Tunggunjagir sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat Desa Tunggunjagir dalam bentuk tenaga  
Masyarakat Desa Tunggunjagir berpartisipasi menyumbangkan tenaga sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam pembangunan Japordes di Desa Tunggunjagir. Masyarakat Desa Tunggunjagir sangat aktif dalam memberikan berupa tenaga. Keaktifan masyarakat tersebut dinilai dengan memberikan ongkos kerja.
  - b. Partisipasi masyarakat Desa Tunggunjagir dalam bentuk uang  
Masyarakat Desa Tunggunjagir berpartisipasi menyumbangkan uang karena keterbatasan waktu tidak bisa menyumbangkan partisipasi dalam bentuk tenaga. Partisipasi ini dilakukan masyarakat Desa Tunggunjagir dengan sukarela. Dana tersebut digunakan uuntuk operasional dan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala di Desa Tunggunjagir
  - c. Partisipasi masyarakat Desa Tunggunjagir dalam bentuk bahan (material)  
Masyarakat Desa Tunggunjagir berpartisipasi menyumbangkan bahan ini dalam bentuk sumbangan berupa pasir dan batu serta makanan yang dibeikan kepada para pekerja secara sukarela berdasarkan kemampuan. Sumbangan tersebut diberikan oleh masyarakat atas dasar rasa kekeluargaan dan gotong-royong dalam pembangunan Japordes.
3. Partisipasi masyarakat Desa Tunggunjagir pada tahap pemanfaatan (*Partisipation in Benefit*) dalam tahap ini pada pembangunan Japordes adalah baik. Masyarakat Desa Tunggunjagir berupaya menjaga agar manfaat dari adanya jalan Desa Tunggunjagir ini dapat dirasakan untuk bersama. Dalam mewujudkan hal itu masyarakat Desa Tunggunjagir berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan untuk menjaga dari kerusakan dan kerja bakti memelihara jalan Desa Tunggunjagir.
  4. Partisipasi masyarakat Desa Tunggunjagir pada tahap evaluasi (*Partisipation in Evaluation*) dalam tahap ini pembangunan Japordes di Desa Tunggunjagir adalah baik. Masyarakat Desa Tunggunjagir berpartisipasi dalam “ Rapat Evaluasi Pembangunan Japordes di Desa Tunggunjagir secara aktif. Melalui perwakilan yang telah ditunjuk masyarakat Desa Tunggunjagir berupaya untuk memberikan kritik dan saran mereka dalam Pembangunan Japordes.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan berkaitan dengan partisipasi masyarakat Desa Tunggunjagir dalam pembangunan Japordes di Desa Tunggunjagir, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat Desa Tunggunjagir dalam tahap perencanaan pembangunan jalan Desa Tunggunjagir supaya lebih ditingkatkan agar mampu menyerap lebih banyak aspirasi masyarakat sehingga perencanaan pembangunan jalan Desa Tunggunjagir yang akan datang menjadi lebih matang.
2. Pada fenomena pemberian uang saku yang diberikan oleh aparat pemerintah desa diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi bukan hanya sekedar memaksa masyarakat untuk menghadiri sebuah rapat, tujuan dari pemberian uang hanya untuk memotivasi masyarakat dan sebagai uang pengganti waktu yang telah dluangkan untuk mengikuti rapat "uang leleh".
3. Partisipasi masyarakat Desa Tunggunjagir dalam tahap evaluasi pembangunan jalan Desa Tunggunjagir harus diupayakan lebih, yaitu dengan menentukan jadwal pelaksanaan musyawarah perbaikan sesering mungkin. Evaluasi ini yang lebih sering ini diharapkan dapat memberikan penilaian tentang apa saja yang masih kurang dalam evaluasi tersebut sehingga dapat ditinjau ulang agar tidak terjadi kerusakan yang parah.
4. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah Desa Tunggunjagir dengan seluruh masyarakat Desa Tunggunjagir agar mampu menumbuhkan pemahaman dan kesamaan tujuan di antara kedua belah pihak tersebut. Aparat Desa Tunggunjagir dan pihak terkait lainnya harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dengan cara turun ke lapangan langsung agar mengetahui apa yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat Desa Tunggunjagir dan dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Tunggunjagir dalam pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan tanpa menunggu adanya pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adisasmita, Raharjo.(2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Makasar : Graha Ilmu Arikunto.

Afifudin & Saebani, B.A. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Ajiswarman. 1996. Partisipasi Perantau Minang dalam Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Kelompok Tani

Subur Jaya, Desa Cihereang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Skripsi. Bogor.

Arimbi. (1993). *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*, WALHI, Jakarta.

Bryan, Caroline. & Louise G White. 1982. *Managing Development in Third World*. Colorado: Westview Press, Boulder.

Buku Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tahun 2014

Cohen, Uphoof dalam Soepomo. 1992. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: CV. Karyako.

Febriana YD.2008. Partisipasi Masyarakat dalam Program Corporate Social Responsibility "Kampung Siaga Indosat" (Studi Kasus: RW 04, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta selatan.

Huraerah, Abu. (2008). *Pengorganisasian, Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Humaniora.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto.2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Mikkelsen, Britha. (2001). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Moleong, Lexy, J. 2000. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ndraha, Taliziduhu. 1987. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara

Pusic, Adi, Isbandi Rukminto.2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI.

Sastropoetro, RA. Santoso,1988, Partisipasi, komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan, Penerbit Alumni, Bandung

Slamet, Y.1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Sugiono.2012b. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sunarti, 2003, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok* Jurnal Tata Loka, Semarang: Planologi UNDIP.

Suwignjo, 1985. *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*. Yogyakarta; Penerbit Ghalia Indonesia.

Tamarli.1994. Partisipasi Petani dalam Penyuluhan dan Penerapan Program Supra Insus. Tesis. Bogor.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. Manajemen Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung.

Usman, Husain & Akbar, Purnomo Setiadi,2006.*Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wicaksono MA. 2010. Analisis Tingkat Partisipasi Warga Dalam Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus: PT Isuzu Astra Motor Indonesia Assy Plant Pondok Ungu). Skripsi. Bogor.

## **B. Arsip**

Daftar Isian Profil Desa/Kelurahan Kabupaten Lamongan Tahun 2014

Peraturan Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2014

Daftar Hasil Musrenbang Desa Tahun 2013 Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2014 Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan

Daftar Hadir Rapat Musrenbangdes Desa Tunggunjagir Tahun 2013-2014